

Judul : Sensus Ekonomi Tentukan Arah Pembangunan Bangsa
Tanggal : Selasa, 28 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Potret Denyut Nadi Perekonomian

Sensus Ekonomi Tentukan Arah Pembangunan Bangsa

Senayan berharap Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) bukan sekadar rutinitas statistik, melainkan kompas utama yang menentukan arah pembangunan bangsa. Pemerintah Pusat dan Daerah diminta memprioritaskan anggaran untuk program tersebut.

ANGGOTA Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mengatakan, sensus merupakan mandat UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang wajib dilakukan setiap sepuluh tahun. Jangan sampai anggaran program tersebut dipangkas agar data hasil sensus menjadi dasar kuat agar bagi kebijakan Pemerintah.

"Pelaksanaan pembangunan itu adalah dengan sensus, supaya kita punya data yang kuat, akurat, dan aktual. Maka 2026 ini harus dilaksanakan," kata Abdul Fikri dalam keterangannya, kemarin.

Karenanya, dia memastikan akan bersuara lantang jika ada rencana efisiensi sampai mengor-

bankan program sensus tersebut. Pasalnya, jika ingin pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen, maka data dasarnya harus kuat dan akurat dan tidak hanya berdasar asumsi.

"Selain soal anggaran, masalah literasi statistik masyarakat juga krusial, agar data yang terkumpul akurat dan dapat digunakan untuk membuat kebijakan yang tepat sasaran," tegas politisi PKS itu.

Anggota Komisi X DPR Puti Guntur Soekarno menambahkan, SE2026 sangat penting untuk memotret denyut nadi perekonomian. Diharapkan, SE2026 bisa mendapatkan data yang akurat, inklusif, representatif, dan



Abdul Fikri Faqih

memberikan penguatan agar bisa menjadi basis kebijakan nasional yang sangat penting.

Puti mengingatkan soal pentingnya jaminan kerahasiaan data yang dikumpulkan dari masyarakat. Hal tersebut mengacu pada UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, khususnya Pasal 21. Jangan ada kasus data yang

seharusnya rahasia justru malah bocor.

"Masyarakat harus merasa kerahasiaan mereka betul-betul terjamin, data tidak bocor. Karena hari ini kan kalau kita bicara data, ya kita lihat di mana-mana banyak sekali kebocoran data," tambahnya.

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 memiliki tantangan yang besar, terutama dalam hal penganggaran. Puti menyebutkan, total kebutuhan anggaran sensus ekonomi diperkirakan mencapai sekitar Rp 8,5 sekian triliun. Sedangkan indikatif awalnya kurang lebih 3,6 triliun rupiah.

Puti memastikan, DPR melalui fungsinya dalam penganggaran akan memastikan optimalisasi dan transparansi penggunaan dana. Pihaknya juga akan membahas kemungkinan penambahan anggaran jika terdapat kekurangan. "Kami berharap SE2026 bisa

berjalan sukses dan memberikan kontribusi sebesar-besarnya untuk bangsa dan negara," ucapnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan masih menghadapi kekurangan anggaran lebih dari Rp 1 triliun. Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi menegaskan, pemenuhan kekurangan anggaran tersebut akan terus diupayakan agar SE 2026 dapat berjalan lancar.

"Kami juga yakin bahwa Pemerintah akan memenuhi hal tersebut karena Sensus adalah amanat dari undang-undang dan harus dilaksanakan," ujar Sonny.

Saat ini, lanjut Sonny, pihaknya terus melakukan persiapan secara optimal meskipun masih terkendala dengan kekurangan anggaran. "Kami yakin, karena komunikasi sudah dilakukan dan juga DPR serta Presiden sangat mendukung BPS," tambahnya. ■ PYB